

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**SITI MIFTAHUL HIDAYATUS SOLEHAH**

**NPM: 1621020331**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**SITI MIFTAHUL HIDAYATUS SOLEHAH**

**NPM: 1621020331**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag**

**Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Penyusunan dan pengesahan peraturan daerah perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda lain, atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berkaitan dengan pembatalan peraturan daerah ini salah satunya terjadi di Provinsi Lampung yang mana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah dibentuk untuk mencabut peraturan daerah yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Peraturan daerah yang dibatalkan dan dicabut oleh peraturan daerah diatas berdasarkan berbagai alasan antara lain; Bertentangan dengan UUD 1945, dibatalkan karena adanya peralihan kewenangan, dan berbagai alasan lainnya.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini antara lain; Faktor-faktor atau hal-hal yang mendasari pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Peraturan Daerah yang mencabutnya dan Pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam melihat pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang yang di cabut melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang mengambil sumber informasi dari buku- buku, skripsi, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai literatur- literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun faktor yang mempengaruhi pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 adalah pengalihan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proyek strategis nasional agar pengelolaan sumber daya daerah agar lebih efisien jika menjadi urusan pemerintah. Selain itu, jika dikaitkan dengan siyasyah dusturiyah pencabutan ini dikarenakan adanya perubahan yang dipengaruhi faktor keadaan atau kondisi dimana Perda ini harus dicabut untuk memenuhi tujuan pemerintah dalam melaksanakan proyek strategis nasional dan dilihat dari hukum positif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pencabutan peraturan daerah ini telah sesuai.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Miftahul Hidayatus Solehah

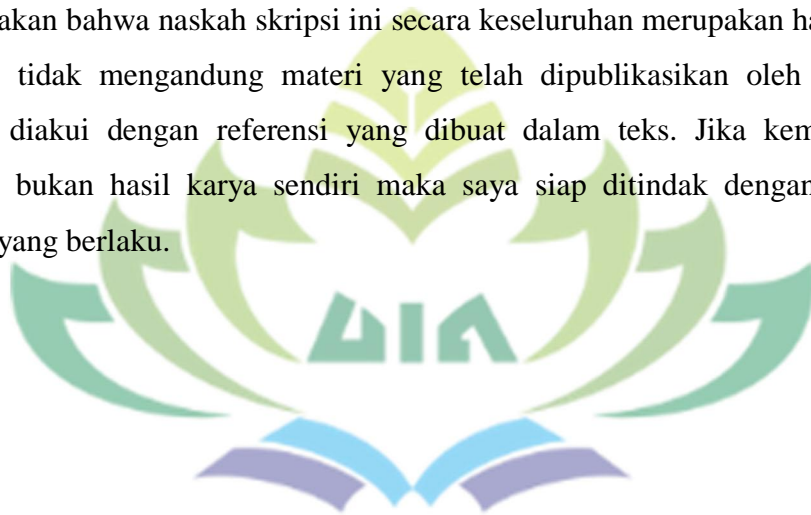
NPM : 1621020331

Program Studi : Hukum Tatanegara (*SiyasahSyar'iyah*)

Fakultas : *Syari'ah*

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil orisinal penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali diakui dengan referensi yang dibuat dalam teks. Jika kemudian hari terbukti bukan hasil karya sendiri maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Bandar Lampung, 23 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,

**Siti Miftahul Hidayatus Solehah**

**NPM. 1621020331**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama:

Nama : Siti Miftahul Hidayatus Solehah  
NPM : 1621020331  
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**  
**NIP.195707051989031001**

Pembimbing II

**Muhammad Jayus, M.H.I.**  
**NIP.198802092019031007**

Mengetahui  
Ketua Program Studi

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah” Disusun oleh: **Siti Miftahul Hidayatus Solehah**, NPM : **1621020331**, Program Studi: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari’ah pada Hari/Tanggal 1 Desember, 2020.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua**

**: Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

(.....)

**Sekretaris**

**: Rudi Santoso, S.H.I., M.H.**

(.....)

**Penguji I**

**: Marwin, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji II**

**: Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**

(.....)

**Penguji III**

**: Muhammad Jayus, M.H.I.**

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih utama akibatnya.”*

(QS. An-nisa/4:59)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

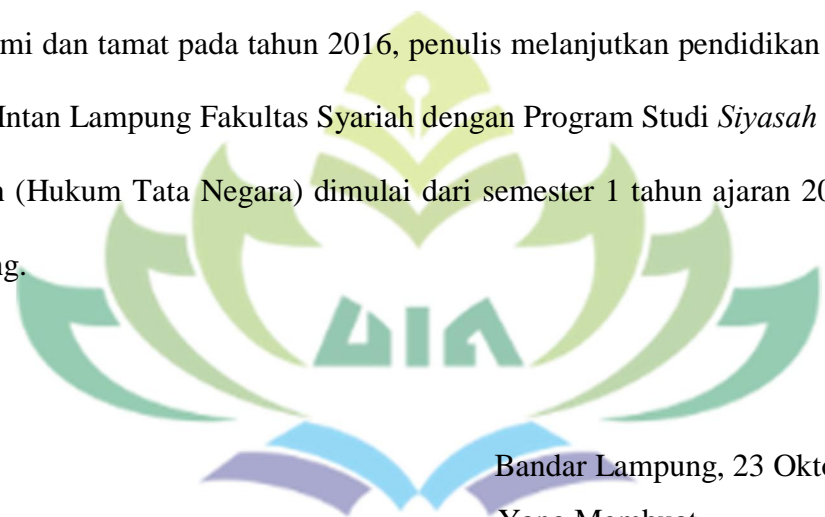
1. Kepada kedua orang tuaku tersayang, Bapak Suwandi dan Ibu Neneng Maryata yang telah membesarkan dan merawat Ita sejak dari kecil dengan sepenuh hati dan kasih sayang tanpa pamrih. Karenado'adandukungan kalian yang  
tiadahabisnyadalamperjalanankuliahItasehinggaskripsiinidapatterselesaikan.  
SkripsidangelariniItapersembahkansebagaihadiahuntuk kalian  
BapakdanIbukutercintajugasebagaibentuk rasa terimakasihkepada kalian  
berduaterutamaibukuwanita super hebatdankuat yang pernahItakenal di dunia.
2. Kepada Mbah Kakung dan Mbah Putri, meskipun kalian sudah tiada skripsi ini aku persembahkan untuk kalian dari cucumu tersayang, beristirahatlah dengan tenang *al-Fatihah*.



## RIWAYAT HIDUP

Siti Miftahul Hidayatus Solehah, dilahirkan di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 13 Maret 1999, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suwandi dan Ibu Neneng Maryata.

Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh mulai dari SD Negeri 2 Subik yang tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 2 Abung Tengah dan tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah tingkat atas di SMA Negeri 4 Kotabumi dan tamat pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan Program Studi *Siyasah Syar'iyah* Siyasah (Hukum Tata Negara) dimulai dari semester 1 tahun ajaran 2016 hingga sekarang.



Bandar Lampung, 23 Oktober 2020  
Yang Membuat,

Siti Miftahul Hidayatus Solehah  
NPM. 1621020331

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah” sebagai persyaratan guna mendapatka gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selakuRektor UIN RadenIntan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selakuDekanFakultasSyari’ah UIN RadenIntan Lampung.
3. BapakFrenki, M.Si. SelakuKetuaProdi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*)danBapakHervinYokiPradikta, M.H.I. selakuSekretarisProdi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) UIN RadenIntan Lampung.
4. Bapak Dr. H.BunyanaSholihin, M.Ag. dan Muhammad Jayus, M.H.I. selakuPembimbing I danPembimbing II, yang penuhkesabaranmemberikanbimbingandanpengarahankepadapenulisdalamnyelesaikanskripsiini.

5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengarah dan ilmu di bangkukuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Suparmodan Ibu Sudarti yang telah memberikan kontribusi kalian dalam perjalanan kuliah ini.
7. Teman sekamarku Fitri Setianingsih yang selalu mendengarkan keluh kesahku selama kuliah dan kontribusinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sulistiawati Anggi Mawarni dan Intan Palupi sebagai teman yang selalu memberikan dukungan moral dan tenaga dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Binti Amanah dan Yulia Ayu Prasetya sebagai teman yang aku dapat dari KKN yang selalu memberikan dukungan moral dan tenaga sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Ibu Nur Rahma, S.H.I., M.H. dan Ibu Darania Anisa, S.H.I., M.H., yang turut serta memberikan bimbingan dan dukungannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada Intan Mawarani temanku yang telah memberikan dukungan moral kepada ku hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Teman-temanku satu angkatan 2016 Siyasah F terima kasih telah mengisi hari-hari perkuliahan ku sehingga lebih berwarna.
13. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



14. Orang-orang yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena kalian semua akubisa berada di titik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung, 23 Oktober 2020

Yang Membuat,

Siti Miftahul Hidayatus Solehah

NPM. 1621020331

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER JUDUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>COVER JUDUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. PenegasanJudul .....	1
B. AlasanMemilihJudul .....	2
C. LatarBelakangMasalah.....	4
D. FokusPenelitian .....	11
E. RumusanMasalah .....	12
F. TujuanPenelitian .....	12
G. SignifikasiPenelitian .....	13
H. MetodePenelitian.....	14
<b>BAB II    KAJIAN TEORI</b>	
A. LandasanTeori	
1. PeraturanPerundang-Undangandalam Islam	
a.PengertianHukum Islam .....	20
b.Prinsip-PrinsipdanMacam-MacamHukum Islam...	
c. <i>Nasikh Mansukh</i> .....	33
d. <i>SiyāsahDusturiyah</i> .....	35
2. Pembentukan, Fungsi, danMuatanPeraturan Daerah	
a.PengertianPeraturan Daerah.....	45

b. Fungsidan Muatan Peraturan Daerah .....	51
c. Pembentukan Peraturan Daerah dan Kedudukannya .....	59
d. Pencabutan Peraturan Daerah .....	67
B. Tinjauan Pustaka .....	70
<b>BAB III    DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi tentang Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembatalan Beberapa Peraturan Daerah	
1. Latar Belakang terbentuknya Perda Nomor 1 tahun 2017 .....	73
2. Ringkas Materi Dalam Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 .....	76
3. Materi Muatan Perda Nomor 1 Tahun 2017 atas Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2011 .....	83
<b>BAB IV    ANALISIS DATA</b>	
A. Faktor-faktor yang Mendasari Pencabutan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Angkutan Ba rang Yang Dicabut Melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 .....	91
B. Hukum Islam dan Hukum Positif Atas Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 Sebagai Perda Yang Mencabutnya Lampung Nomor 1 Tahun 2017 .....	96
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. Rekomendasi .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	101
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	105
Lampiran 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017	
Lampiran 2 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011	
Turnitin	
Kartu Konsultasi	





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini, untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **“Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>
3. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.393.

<sup>2</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h.41.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah” adalah penguraian bagaimana pandangan hukum Islam tentang Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Terdapat beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Sebuah peraturan tidaklah serta merta dibuat, begitu juga dengan berkaitan pencabutan atau pembatalannya. Hal ini juga berlaku untuk sebuah Peraturan Daerah, yang mana Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah membatalkan beberapa Perda yang telah berlaku sebelumnya. Sebuah aturan perundang-undangan di buat untuk mencapai tatanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dalam hal ini juga berkaitan dengan hukum Islam yang mana hukum yang di bentuk haruslah berkeadilan. Dengan demikian penulis ingin melihat bagaimana proses pembentukan sebuah peraturan perundang-

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 Ayat 8.



undangan dan alasan-alasan mengapa sampai terjadi kasus pembatalan dan/atau pencabutan sebuah peraturan dalam hal ini juga selain menggunakan teori hukum positif melainkan juga menggunakan teori hukum Islam.

- b. Penulis ingin membahas tentang pencabutan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mengambil sebuah perda sebagai peraturan yang akan diteliti karena masih jarang ada yang membahasnya, terutama melalui perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji, kemudian mengangkatnya sebagai sebuah judul skripsi.

## 2. Alasan Subyektif

- a. Tema tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017” menurut saya sangatlah menarik untuk diteliti dan dikaji untuk melihat bagaimana sudut pandang hukum Islam dan hukum publik.
- b. Kajian terkait Pencabutan Perda yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 yaitu merupakan bidang keilmuan penulis Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan Jurusan Siyasah yang notabene merupakan membahas tentang peraturan hukum positif beserta aturan-aturan yang ada didalamnya.

### C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum,<sup>4</sup> hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia menganut desentralisasi, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Berkaitan dengan negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>5</sup> Hal ini tentunya tidak terlepas dari peraturan yang mengatur tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Berkenaan dengan negara hukum tentunya memiliki tujuan negara yang harus dicapai, yaitu bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tidak dapat dipungkiri semakin dinamisnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang seiring dengan kompleksitas persoalan yang perlu

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal ayat 3.

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.17.

diatur dan diselesaikan melalui instrumen hukum Indonesia dewasa ini, ikut dipengaruhi oleh adanya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan penggantinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) yang merupakan acuan yuridis-sistematis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini bukan saja menjadi dasar kepastian hukum bagi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tetapi juga ditentukan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Seorang Guru Besar bidang Ilmu Hukum Tata Negara, Bagir Manan berpendapat bahwa makin besarnya peran peraturan perundang-undangan terjadi karena beberapa hal:

1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis bentuk, jenis, dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatannya.
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali.

---

<sup>6</sup>Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Konsep Dan Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 2.



3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji baik dari segi-segi formal maupun materi muatannya.
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat.<sup>7</sup>

Keutamaan yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan sebagai jenis aturan hukum tertulis bukannya tanpa mengandung kelemahan, menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan juga mengandung berbagai masalah, antara lain: *pertama*, peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat; *kedua*, peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap memenuhi semua peristiwa hukum dan tuntutan hukum dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum (peraturan).<sup>8</sup> Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan tersebut memicu munculnya pembatalan dan pencabutan peraturan perundang-undangan atau penggantian peraturan perundang-undangan dengan yang baru, dalam hal itu terjadi juga pada Perda. Peraturan daerah adalah produk hukum dari otonomi daerah yang merupakan bentuk dari penyelenggaraan desentralisasi, yaitu daerah diberikan kebebasan untuk mengatur urusan pemerintahan daerah masing-masing yang tiap-tiap provinsi

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 3-4.

di Indonesia memiliki peraturan daerah yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga daerah mereka masing-masing.

Desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintahan daerah, yang diberi otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.<sup>9</sup>

Indonesia telah menjalankan otonomi daerah secara luas sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada era ini, Pemerintah Daerah bersama DPRD diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah menunjukkan adanya peluang bagi daerah mengatur wilayahnya sendiri demi memajukan dan memberdayakan secara optimal daerahnya.

Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun dan mengesahkan perda, perlu memperhatikan pada adanya tata urutan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perda harus berdasarkan atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda lain, atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kaitan dengan pengawasan represif, perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Sehubungan

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.17 .

dengan pembatalan tersebut, tidak kurang dari 3.143 perda menjadi objek dari kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membatalkan perda dari berbagai daerah di Indonesia.<sup>10</sup> Salah satu dari perda tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Perda tersebut di batalkan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5215 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang, Karena sesuai dengan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bagian O Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan disebutkan bahwa penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbang kendaraan bermotor menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Setelah pembatalan Perda tersebut, kemudian dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 yang mencabut Perda tersebut dan beberapa Perda lainnya antara lain, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 3-4

Sebuah peraturan dibentuk dengan memiliki tujuan dan fungsi yang mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>11</sup> Namun pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 yang mana perda tersebut berisi tentang atas pencabutan beberapa perda, khususnya Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tidak mendatangkan suatu kebaikan didalamnya. Sebelum Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 dicabut, kewenangan penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbang kendaraan bermotor menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga kendaraan bermotor ditimbang beratnya untuk menghindari kelebihan muatan angkutan barang yang dapat menyebabkan jalan rusak, bahkan karena kelebihan muatan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan. Setelah pencabutan perda tersebut dan kewenangannya beralih menjadi kewenangan pusat, maka setiap daerah tidak lagi memiliki kewenangan akan penetapan timbangan kendaraan bermotor yang menyebabkan masalah-masalah baru, yang seperti kita ketahui bahwa jalan-jalan banyak yang mudah rusak meskipun baru saja diperbaiki, dan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas dikarenakan kelebihan muatan.

Sebagai negara yang menganut desentralisasi, pemerintahan daerah diberikan kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5

rumah tangga daerah namun disini kewenangan yang tadinya merupakan kewenangan pemerintah daerah berubah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan perda yang dicabut tersebut memberikan *mashlahat* bagi masyarakat daerah. Hal yang terjadi setelah pencabutan perda ini sebaliknya, yaitu muncul masalah baru yang menimbulkan *kemudharatan*. Peraturan dibuat haruslah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan juga kebaikan didalamnya sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."<sup>12</sup>

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalahnya pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan *ukhrawi*, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya,<sup>13</sup> sehingga pemerintahan yang baik akan tercapai dengan tatanan hukum yang baik pula, dengan tercapainya tatanan hukum yang baik tercapailah *kemashlahatan* sebagai tujuan dibentuknya suatu hukum.

<sup>12</sup> QS. An-Nisa(4): 58.

<sup>13</sup> Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum dan Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h.2.



Dengan demikian penulis ingin meneliti mengenai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 dengan fokus penelitiannya tentang pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2011 melalui perspektif hukum Islam secara terperinci dan juga hukum positif. Sebagaimana terangkai dalam sebuah judul : “Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah”.

#### **D. Fokus Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat terfokus kepada fokus penelitian yang akan dijalankan.

Sehingga peneliti akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yang akan dijalankan yaitu mengenai “Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah”. Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjabarkan mengenai apa saja faktor dan/atau hal yang mendasari pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Perda yang mencabutnya dan sebelumnya telah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5215

Tahun 2016, selain itu untuk melihat analisis hukum Islam terhadap pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 secara lebih mendalam lagi.

#### **E. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor atau hal-hal yang mendasari pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Peraturan Daerah yang mencabutnya?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam melihat pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang yang di cabut melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk Mengetahui apa saja faktor-faktor atau hal-hal yang mendasari pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Peraturan Daerah yang mencabutnya.

b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam melihat pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang yang di cabut melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017.

2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademis dari teori yang ada terutama ilmu siyasah syar'iyah pada umumnya dan khususnya bagi sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang dibidang hukum Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan siyasah syar'iah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

Pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendasari dari pencabutan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 dan mampu menganalisis lebih mendalam tentang faktor-faktor tersebut. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang dibidang hukum Islam. Selain itu, hasil

penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis khususnya yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap faktor-faktor yang mendasari tentang pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Peraturan Daerah yang mencabutnya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh dalam lingkungan sosial, dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, dan bersifat analitik. Hal ini dimaksudkan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan syarat ilmiah yang ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut terdapat di dalam metode sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Penelitian

Ditelisik dari jenisnya penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) yakni suatu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku- buku, sistem dari sebuah negara, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai literatur- literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti,<sup>14</sup> yaitu sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan hukum Islam khususnya mashlahah mursalah dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *analitik* yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>15</sup> Dalam pelaksanaan penelitian yang menggunakan metode deskriptif, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksitas (pemilihan) data dan penentuan data yang dianggap representatif (dapat di jelaskan) dengan baik. Pendekatan yang digunakan dalam

---

<sup>14</sup> Ranny Kautum, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38.

<sup>15</sup> Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 154.



penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala- gejala yang ditemukan, yang tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka melainkan melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku atas terbentuk begitu saja karena realitas yang baru, yang menjadi indikasi (tanda) signifikan terciptanya konsep baru.<sup>16</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis data yang menunjang keakuratan penulisan proposal ini, diantaranya sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Bahan Hukum Primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih lagi bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari al-Qur'an, Hadits, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi lampug Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 90.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), yaitu buku- buku, makalah- makalah, majalah, jurnal, artikel- artikel, internet dan sumber -sumber yang berkenaan dengan penelitian ini, rancangan peraturan perundang- undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.<sup>18</sup>

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka penulis mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain yaitu buku-buku hukum Islam, buku tentang hukum positif, buku tentang pembentukan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 160.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *Editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu usaha untuk membuat klasifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diproses untuk mengetahui, apakah data-data yang telah diproses sesuai atau tidak dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan memudahkan analisa data.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
- d. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>19</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

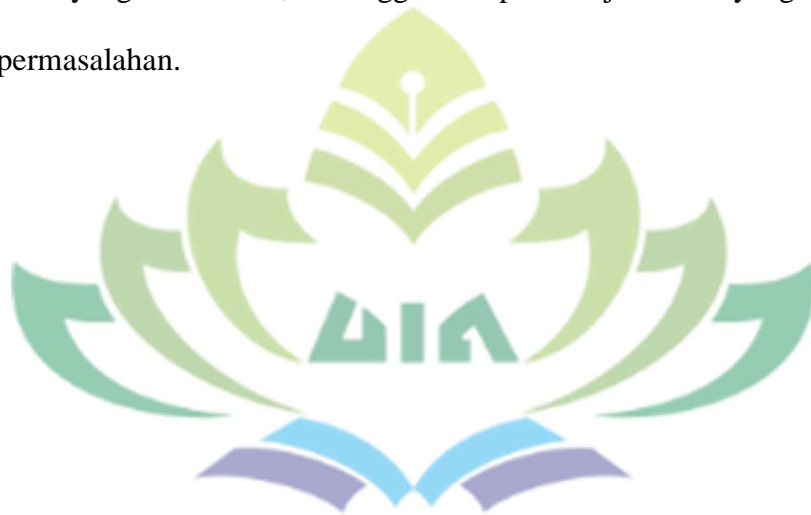
Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.

---

<sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.”<sup>20</sup>

Dengan pendekatan berfikir secara deduktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta dan peristiwa yang umum ditarik kepada fakta dan peristiwa yang bersifat khusus. Dengan metode ini penulis dapat memilah dan menyaring data yang telah terkumpul, dilanjutkan dengan menganalisa data yang telah ada, sehingga didapatkan jawaban yang benar atas permasalahan.



---

<sup>20</sup>*Ibid.*

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Peraturan Perundang-Undangan dalam Islam

###### a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Hukum Islam merupakan ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam islam atau yang dikenal dengan istilah *syari'ah*.<sup>21</sup> Sedangkan *syari'ah* menurut Ibnu Taimiyah r.h.a, adalah ketentuan hukum yang disyariatkan Allah berupa jalan yang harus dilalui oleh hamba-Nya. Maka *syari'ah* merupakan suatu ketentuan hukum yang bersumber dari Allah yang Maha Tinggi sebagai sumbernya.<sup>22</sup>

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah

---

<sup>21</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018) h.9.

<sup>22</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h.11.



swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>23</sup>

Pernyataan di atas merupakan beberapa pengertian dari hukum Islam, dapat kita simpulkan bahwa hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.

## **b. Prinsip-Prinsip Hukum Islam**

### **1) Prinsip-Prinsip Hukum Islam**

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau *al-mabda'*.<sup>24</sup> Kata prinsip secara etimologi adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S.Praja dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* menyatakan bahwa secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak

<sup>23</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24.

<sup>24</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.22.

pembinaanya, prinsip yang membentuk hukum, dan setiap cabang-cabangnya.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip-khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.<sup>25</sup>

Prinsip umum hukum Islam (prinsip universalitas) mewarnai seluruh bidang dalam hukum Islam, dia masuk pada bidang politik, bidang jinayah, bidang waris, bidang muamalah dan lain sebagainya. Terdapat perbedaan pandangan para ulama dalam mengakumulasi berbagai prinsip hukum Islam tersebut.<sup>26</sup>

Terdapat tujuh prinsip umum hukum Islam, diantaranya sebagai berikut:

a) Prinsip Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *"la ilaha illa Allah"* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-qu'an memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umatnya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah.

<sup>25</sup> Husnul Fatarib, Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam), *NIZAM*, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014, h.65-66.

<sup>26</sup> Muhammad Rusfi, Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, *AL-ADALAH* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, h. 249.

Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan manifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan ketentuan dari Allah (Al-qur'an dan sunah). Allah adalah pembuat hukum (*syar'i*), sehingga siapapun yang tidak menetapkan hukum dengan ketetapan Allah, maka seorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta zalim karena menetapkan hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu. Hal tersebut seperti firman Allah yang terdapat dalam ayat al-qur'an surah al-Maidah ayat 44, 45, dan 47:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَلِيلٍ قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan

mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (44).

وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ

بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ

تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (45)."

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ

اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.(47)"<sup>27</sup>

Setelah prinsip umum yang berupa prinsip tauhid maka

lahir prinsip umum dalam bidang ibadah, yaitu: a) pertama:

Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara, artinya

<sup>27</sup>QS. Al-Maidah (5) :44, 45, 47.

bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai dzat yang wajib disembah. Nabi dan Rasul pun hanya sebatas penyampai pesan-pesan Allah semata. Intinya adalah yang berhak disembah adalah hanya Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa tak ada perantara antara hamba dengan tuhan nya seperti yang terdapat dalam agama lain. b) *kedua*: Prinsip beban hukum (*taklif*) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah. Berdasarkan prinsip tauhid dan prinsip-prinsip yang mendukungnya maka lahirlah asas hukum seperti asas kemudahan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan sehingga semua hukum Islam dapat dikerjakan oleh manusia.<sup>28</sup> Karena sesungguhnya Islam itu tidak pernah memberatkan bagi umatnya, sekalipun dalam hal beribadah.

Dalam hukum Islam dikenal beberapa bentuk keringanan hukum seperti, *rukhsah* dan *dharurah*. Rukhsah (*concessionary law*) merupakan keringanan dalam melaksanakan sesuatu yang sebelumnya terlarang, seperti ibadah menjamak shalat, memendekkan shalat dan lain

---

<sup>28</sup>Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam...*,h.66.



sebagainya dalam rangka menghindari kesukaran (*masyaqqah*). Sedangkan darurat (*necessity/exigency*) adalah keadaan kritis/serius yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar terhindar dari kerusakan yang fatal atau kebinasaan.<sup>29</sup>

Berdasarkan dari asas hukum tersebut dirumuskan kaidah-kaidah hukum dalam aspek ibadah sebagai berikut : a) *al-ashlu fi al- 'ibadat at-tauqif wa al-ittiba*, yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Dasar dalam ibadah adalah menyembah dan mengikuti teks. Menyembah semata-mata karena Allah meskipun terkadang tidak sejalan dengan logika. Menurut as-Syatibi, secara umum hikmah dari ibadah adalah melaksanakan perintah Allah, taat, mengagungkan dan menghadap hanya kepada-Nya. b) *almasyaqqah tajlib at-taysir*, yaitu kesulitan (dalam melaksanakan ibadah) akan mendatangkan kemudahan.

#### b) Prinsip Keadilan

Islam menekankan tentang prinsip keadilan, terbukti dengan banyaknya ayat perintah berbuat adil. Di antaranya adalah surah al-Maidah ayat 8, al-Hujarat ayat 9. Terminologi

---

<sup>29</sup> Qutub Musthafa Sanu, *Mu'jam Musthalahat Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-Mu'ashir 2000, h. 217 dan h. 265.

kedilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain.<sup>30</sup>

Keadilan hukum wajib ditegakkan didunia ini. Oleh karenanya hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dengan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata, semua diperlakukan sama dihadapan hukum<sup>31</sup> atau kita kenal dengan prinsip *equality before the law*. Sikap adil yang kita terapkan menjadikan orang yang bertakwa kepada Allah SWT, sebagaimana Allah menyuruhmu menegakkan sebagai orang-orang beriman kepadaNya dalam surah an-Nisa:135 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>30</sup> Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam...*, h.68-69.

<sup>31</sup> Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.48.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."*<sup>32</sup>

Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.<sup>33</sup> Dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa Allah semata-mata hanya memberi pengajaran pada manusia bagaimana berperilaku yang baik untuk menciptakan kemashlahatan pula pada individu kehidupan bermasyarakat, sesungguhnya mashlahat dari ketaatan manusia itu keuntungannya bukan untuk Allah SWT melainkan untuk manusia itu sendiri begitupun dengan maksiat yang dilakukan manusia serta kemudharatannya.

Dilihat dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat

---

<sup>32</sup> QS. An-Nisa (4): 135.

<sup>33</sup> Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam...*,h.69.

sesuai dengan ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*), yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam (*murunah*) dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan (*yusr wa raf'i al-haraj*), yaitu; perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.<sup>34</sup>

c) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Prinsip ketiga ini lahir dari dua prinsip sebelumnya yaitu prinsip tauhid dan prinsip keadilan, yaitu setiap tindakan yang harus berdasarkan kepada asas *amar ma'ruf nahi munkar*. Suatu dimana tindakan hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridh'ai oleh Allah SWT.

Hukum Islam hadir sebagai prinsip *nahi munkar* untuk memerankan fungsi *social control*, memberikan batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Sebagai sarana rekayasa sosial, *amar ma'ruf nahi munkar* berupaya menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana dan berlandaskan keimanan dan ketakwaan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.69.

kepada Allah SWT. Prinsip ini didasarkan pada ayat al-qu'an surah Ali Imran: 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Artinya: "dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."<sup>35</sup>*

a. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya, baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berfikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya. Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun, Islam tetap memberikan batasan nilai, artinya kebebasan yang diberikan oleh agama Islam tidaklah bebas *value* (nilai) atau *liberal* apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, akan tetapi kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain<sup>36</sup> yang berarti bahwa kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah, dan lain-lain.

d) Prinsip Persamaan atau *Egalite*

<sup>35</sup> QS. Ali Imran (3): 104.

<sup>36</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam...*, h.26-27.

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al-Shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Bukti konkrit dari prinsip *egalite* dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun.<sup>37</sup>

Allah SWT telah mengaskan dalam firmanNya surat *al-Hujarat* ayat 13 bahwasannya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku tentu dengan segala perbedaan yang ada untuk saling mengenal, namun Allah juga mengatakan bahwa yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa. Hal ini dapat kita pahami bahwa Allah menganggap semua manusia itu sama, kita semua ini sama dihadapanNya, yang membedakan hanyalah ketakwaan kita. Maka diantara kita hendaklah menerapkan prinsip persamaan diantara sesama manusia sebagaimana Allah memperlakukan kita semua

---

<sup>37</sup> Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam...*, h.71.



manusia ini sama, tanpa membedakan ras, warna kulit, agama, suku, dan yang lainnya.<sup>38</sup>

e) Prinsip Tolong Menolong (*At-Ta'awun*)

*Ta'awun* berasal dari akar kata *ta'awana ya-ta'awanu*<sup>39</sup> memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

f) Prinsip Toleransi (*Tasamuh*)

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Al- Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah, sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain

---

<sup>38</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam...*, h.27-28.

<sup>39</sup> *Ibid*, h.28.

sebagainya. Peringatan Allah berkaitan dengan toleransi dinyatakan dalam Surat al-Mumtahanah ayat 8 dan 9.<sup>40</sup>

### c. Nasikh Mansukh

Secara etimologis, kata *naskh* yang bentuk *isim failnya* “*nasikh*” dan *isim maf'ulnya* “*mansukh*”, mempunyai arti yang beragam, antara lain : menghilangkan, menghapuskan, membatalkan yang berarti membatalkan atau memindah dari satu wadah ke wadah yang lain, atau juga berarti penukilan dan penyalinan, (Quraish Shihab, 1994, p.143) penghapusan/pembatalan (*al-izalah* atau *al-ibthal*), pemindahan (*al-naql*), pengubahan/penggantian (*al-ibdal*), dan pengalihan (*al-tahwil* atau *al-intiqal*). Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka *nasikh (isim fa'il)* diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan. Sedangkan *mansukh (isim maf'ul)* adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Selain itu ada yang berpendapat bahwa istilah tersebut berarti pembatalan ketetapan hukum yang ditetapkan pada suatu kondisi tertentu oleh ketetapan lain yang berbeda akibat munculnya kondisi lain.

*Nasikh mansukh* terjadi bukan berarti dalam *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah* terdapat kontradiksi, tetapi menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam, sehingga bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosiokultural penerima ajaran. Oleh sebab itu para ulama

---

<sup>40</sup> Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam...*, h.72-73.

*ushul* menetapkan syarat kemungkinan terjadi *nasikh* dan *mansukh*, yaitu: *nasikh* harus terpisah dari *mansukh*, *nasikh* harus lebih kuat atau sama kekuatannya dengan *mansukh*, *nasikh* harus berupa dalil-dalil syara', *Mansukh* tidak dibatasi dengan waktu, *Mansukh* harus berupa hukum syara', *nasikh* wurudnya kemudian setelah *mansukh*', disamping itu perlu diketahui bahwa ada *nash-nash* yang sudah pasti yang tidak mungkin dibatalkan, yaitu :

- 1) *Nash* yang berisi pokok ajaran, baik berupa aqidah atau pokok-pokok ibadah dan pokok-pokok akhlaq, seperti keadilan, kejujuran, larangan syirik, membunuh, mencuri dan lain sebagainya.
- 2) *Nash* yang berisi hukum abadi atau selamanya berdasarkan pernyataan *Nash* itu sendiri.
- 3) *Nash* yang berisi pemberitaan satu kejadian baik yang sudah lewat atau yang akan datang.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, adapun syarat-syarat dari *nasikh mansukh* menurut al-Qhatan adalah sebagai berikut:

- a) Hukum yang dimansukh adalah hukum *syara'*
- b) Dalil penghapusan hukum tersebut adalah *khithab* syar'i yang datang kemudian dari *khithab* yang hukumnya dimansukh.
- c) *Khithab* yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka

hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian itu tidak dinamakan dengan *nasakh*.<sup>41</sup>

#### d. *Siyāsah Dusturiyah*

##### 1) Pengertian Siyasah Dusturiyah

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>42</sup>

Berdasarkan kajian konsep negara hukum tersebut, maka permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian

---

<sup>41</sup> Muhammad Husni dan Fathul Wahab, Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam, *Jurnal Annaba*, Volume 4 No. 2, 1 September 2018, h. 302-303.

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>43</sup>

Menurut pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah* tersebut.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.<sup>44</sup>

Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”<sup>45</sup>

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata

---

<sup>43</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 53.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 52.

ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi penyembah api). Setelah kata tersebut diserap kedalam bahasa Arab kata *dustur* pengertiannya berkembang menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>46</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>47</sup>

Berdasarkan dari berbagai pengertian tentang *fiqh siyāsah dusturiyah* di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa *fiqh siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

---

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah , Kontekstualisasi Doktrin....* h. 177-178.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 178.



kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>48</sup>

## 2) Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: Pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:<sup>49</sup>

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.

<sup>48</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan ...*,h.73.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 48.

3. Bidang *siyasah qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>50</sup>

*Fiqh siyāsah dusturiyyāh* merupakan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>51</sup> Berkaitan dengan tugas pembentukan sebuah peraturan atau perundang-undangan dalam sebuah negara dalam siyasah dusturiyah merupakan tugas dari *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, yang mana jika dikaitkan dengan pemerintahan di Indonesia tugas ini diemban oleh DPR sebagai lembaga legislatif negara. Secara umum siyasah dusturiyah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Imamah

Secara etimologi, kata *imamah* pecahan dari *fi'il amma* (kata kerja). Jika dikatakan, *amma hum* atau *amma bihim*, maknanya yang terdepan dari mereka dan ia berarti *imamah*.

---

<sup>50</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin ...*h. 157-158.

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat...*,h.73.

Sedangkan imam bermakna, setiap yang diikuti dari golongan para pemimpin dan selainnya. Ibnu Manzhur berkata : imam atau pemimpin adalah setiap yang diikuti oleh suatu kaum, baik berada di jalan yang lurus maupun berada di atas kesesatan.

Menegakkan *imamah* merupakan sebuah kewajiban besar di dalam agama, karena manusia itu membutuhkan persatuan, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hal ini mustahil akan terwujud terkecuali jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin saat melakukan sebuah pekerjaan atau sesuatu demi terwujudnya sebuah kemashlahatan dan mencegah timbulnya kemunkaran.

Jabatan kepemimpinan telah resmi diberikan kepada seseorang, maka seluruh umat wajib mengetahui sifat-sifat pemimpin ini. Mereka juga harus mengetahui bentuk fisik atau namanya. Sulaiman bin Jarir berkata, “Manusia wajib mengetahui bentuk fisik dan nama pemimpin seperti halnya mereka diwajibkan mengetahui Allah SWT dan Rasul-Nya.”

Pendapat yang dianuti jumhur ulama, bahwa pengetahuan tentang pemimpin harus dimiliki semua orang secara global dan tidak harus *detail* (terperinci). Kecuali untuk keperluan yang mendesak. Demikian juga para hakim yang memutuskan banyak perkara dan para *fuqaha* yang

memberikan fatwa, umat diwajibkan mengetahui secara global dan tidak *detail*, kecuali pada saat yang mendesak.<sup>52</sup>

## 2. Rakyat dan Kewajibannya

Persoalan rakyat kelihatannya kurang mendapat pembahasan di kalangan para *fuqaha* terdahulu, misalnya Imam Mawardi dan Abu Ya'la tidak menyediakan satu bab yang khusus bagi membicarakan hal ini.<sup>53</sup> Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir *dzimmi* dan ada pula yang disebut *musta'min*. Kafir *dzimmi* adalah warga non muslim yang menetap selamanya serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Sedang *musta'min* adalah orang asing yang menetap untuk sementara dan juga harus di hormati jiwanya, kehormatannya dan hartanya.

Kafir *dzimmi* memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil dan hak-hak politik, sedangkan *musta'min* tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu orang asing. Namun persamaan bagi kedua-duanya adalah non muslim. Adapun hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Terj. Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 22.

<sup>53</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 32.

<sup>54</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat...*h.98.

- a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
- b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
- c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
- d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Hak imam apabila disebutkan adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.<sup>55</sup>

Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak imam.

### 3. *Ba'iat* (Janji Setia)

*Bai'at* (*mubaya'ah*), pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 99.

dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Diaudin Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun tentang *bai'at* ini dan menjelaskan:  
<sup>56</sup>“Adalah mereka apabila *membai'atkan* seseorang *amir* dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian. Hal itu serupa dengan perbuatan si penjual dan si pembeli. Karena itu dinamakanlah dia *bai'at*.”

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Fath: 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنَّا أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar."<sup>57</sup>

Menurut al-Fairuzabady, "Al-Bai'ah berarti berjabat tangan ketika melakukan perjanjian jual beli atau ketika melakukan perjanjian setia (*mubaya'ah*) atau ketika berjanji untuk taat".

*Pembai'atan* dilakukan setelah terjadinya *permusyawaratan* penentuan seorang imam (pemimpin) setelah mencapai kesepakatan. Apabila cara *musyawarah* tidak

<sup>56</sup> *Ibid*, h.100-101.

<sup>57</sup> QS. Al-Fath (48): 10



menghasilkan kesepakatan, maka *imam* dapat *dibai'at* oleh mayoritas *Ahl al-Halli Wa al-Aqd'*. Apabila setelah *dibai'at* oleh mayoritas *Ahl al-Halli Wa al-Aqd'*, maka golongan minoritas pun harus tetap mentaati dan membantu imam, dan tidak boleh berusaha menjatuhkan imam, kecuali kalau imam melakukan kekafiran yang nyata.<sup>58</sup>

#### 4. *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'*

Menurut bahasa *al-'Ahd* berarti “semua yang dijanjikan atau ditetapkan Allah SWT atas seseorang”, seseorang disebut “*Waliy al-Ahdi*” karena ia merupakan pemegang janji dari orang-orang yang *membai'atnya* sebagai khalifah. Dalam pengertian para ahli *siyāsah syar'iyah*, *al-'Ahd* adalah memilih seseorang tertentu untuk melakukan pekerjaan dalam jabatan kenegaraan tertentu, mulai dari jabatan kepada pemerintah sampai kepada jabatan kenegaraan yang paling rendah. Jadi pengertian *al-'Ahd* sebenarnya cukup luas, namun dalam pengertian praktis istilah ini biasanya dipakai untuk menunjuk dalam pemilihan untuk jabatan kenegaraan yang tertinggi yaitu jabatan khalifah atau imam.

*Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* diartikan “dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 105.

atau Dewan Perwakilan Rakyat.”<sup>59</sup> Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Tugasnya antara lain adalah memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* juga disebut oleh Imam al-Mawardi sebagai *Ahl al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi pemimpin mereka yakni khalifah.

#### 5. *Wizarah* (Kementrian)

Imam al-Mawardi menjelaskan *wizarah* dari segi bahasa yaitu di ambil dari kata *al-wizru* yang artinya bebanan, karena *wazir* memikul beban kepala negara. Kedua di ambil dari kata *al-wazar* yang artinya tempat kembali karena kepala negara selalu kembali kepada pendapat dan pertolongan *wazirnya*. Ketiga di ambil dari kata *al-Jazru* yang artinya punggung karena kepala negara yang kuat didukung oleh *wazirnya*, sebagaimana badan yang dikuatkan oleh tulang punggung.<sup>60</sup>

Pada umumnya, ulama mengambil dasar adanya kementerian dengan dua alasan:

#### 1. Firman Allah Surah At-Thaha: 29-31:

<sup>59</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Terj. Faturrahman ( Jakarta: Amzah, 2005), h. 82.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 120.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: "dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,(29)

هَارُونَ أَخِي

(yaitu) Harun, saudaraku(30)

اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي

teguhkanlah dengan Dia kekuatanku(31).<sup>61</sup>

Berdasarkan artinya, maka apabila *wazir* itu diperbolehkan di dalam masalah-masalah kenabian. Maka lebih-lebih diperbolehkan adanya *wazir* di dalam *imamah*.

2. karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu pemimpin tidak mungkin sanggup melaksanakan tugasnya di dalam mengatur umat tanpa adanya *wazir*. Dengan adanya *wazir* (menteri) yang membantu pemimpin di dalam mengurus umat, maka akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan

*Wazir* terdiri dari dua, yaitu *wazir tafwidl* (mandat penuh) dan *wazir tanfidz* (pelaksana). Tugas yang boleh dicampur oleh *Wazir tafwidl* adalah dalam peradilan, mengangkat gubernur (pejabat tinggi negara), menjadi panglima tertinggi peperangan, dan mempunyai wewenang dalam

---

<sup>61</sup> QS. At-Thaha (30): 29-31.

menguasai harta negara dan mengeluarkan dari Baitul Mal. Dari tugas ini terdapat persyaratan pada *wazir tafwidl* yaitu: beragama Islam, mengetahui hukum Islam, dan mengetahui strategi dan taktik perang serta mengetahui cara mengurus keuangan.

6. Penafsiran ayat tentang sistem pemerintahan dalam *siyāsah dusturiyāh*

Kitab suci Alquran banyak ayat-ayat yang ditemukan membahas tentang *siyāsah dusturiyāh*. Terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang pemerintahan yang ideal. Bahkan, ada juga ayat yang menjelaskan sistem pemerintahan serta lainnya. Dalam kajian ini, penulis menfokuskan ayat-ayat yang terkait tentang sistem pemerintahan dalam *siyāsah dusturiyāh*.<sup>62</sup>

## 2. Pembentukan, Fungsi, dan Muatan Peraturan Daerah

### a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 84-85.

<sup>63</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 202.

Selain pengertian di atas terdapat pengertian lain dari Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.<sup>64</sup>

Salah satu bentuk undang-undang atau “*statue*” yang dikenal dalam literatur adalah “*local satue*” atau “*local wet*”, yaitu undang-undang yang bersifat lokal. Dalam literatur dikenal pula adanya istilah “*local constitution*” atau “*local grondwet*”. Dilingkungan negara-negara federal seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman, dikenal dengan adanya pengertian mengenai Konstitusi Federal atau *Federal Constitution* dan Konstitusi Negara-Negara Bagian atau *State Constitution*. Seperti Amerika Serikat misalnya, setiap negara bagian memiliki naskah undang-undang dasar sendiri-sendiri, di samping Konstitusi Federal yang mereka miliki yaitu *Constitution of The United States of America*.

Dalam lingkungan negara-negara yang susunannya berbentuk negara kesatuan (*unitary state* atau *eenheidsstaat*), konstitusi atau undang-undang dasar hanya dikenal di tingkat pusat saja. Sedangkan di daerah-daerah bagian, di provinsi-provinsi (*prefecture*) tidak ada konstitusi tersendiri. Namun demikian, dalam literatur seperti pandangan Wolhoff, di daerah-daerah di lingkungan negara-negara

---

<sup>64</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 Ayat 8.

kesatuan, juga terdapat konstutusi tersendiri pula. Menurutnya, secara teoritis yang berfungsi sebagai konstitusi untuk daerah-daerah bagian dalam negara kesatuan itu adalah Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah di negara-negara yang susunannya berbentuk negara kesatuan disusn sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagi pedoman yang bersifat kostitutif seperti undang-undang dasar bagi daerah-daerah provinsi atau prefektur itu masing-masing.

Berkaitan dengan pengertian "*local constitution*" atau "*locale grondwet*" tersebut di atas, maka peraturan daerah juga dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal meskipun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan daerah itu adalah bentuk peraturan perundang-perundangan di bawah undang-undang dan Peraturan Pusat Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Akan tetapi dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, peraturan daerah itu mirip dengan undang-undang. Pertama, seperti Undang-Undang maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah itu adalah lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Jika undaang-undang dibentuk oleh lembaga legislatif pusat dengan persetujuan bersama dengan presiden selaku kepala pemerintahan eksekutif, maka peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sam dengan kepala pemerintahan daerah setempat. Dengan kata lain, sama dengan undang-undang, peraturan



daerah juga merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang berdaulat. Perda bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat<sup>65</sup> karena merupakan produk yang dibuat oleh para wakil rakyat sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Sebagai produk dari para wakil rakyat bersama dengan bersama dengan pemerintah, maka peraturan daerah dapat disebut sebagai produk legislatif (*legislative acts*), sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi atau produk regulatif (*executive acts*). Perbedaan antara peraturan daerah itu dengan undang-undang hanya dari lingkup teritorial atau wilayah berlakunya peraturan itu bersifat nasional atau lokal. Undang-undang berlaku secara nasional, sedangkan peraturan daerah hanya berlaku di dalam pemerintahan daerah yang bersangkutan saja, yaitu dalam wilayah daerah provinsi, wilayah daerah kabupaten, atau wilayah daerah itu tidak ubahnya adalah “*local law*” atau “*locale wet*”, yaitu undang-undang yang bersifat local (*local legislation*).<sup>66</sup> Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan untuk mengatur

---

<sup>65</sup> Iwan Sulistiyo dkk, Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018, h.197-198.

<sup>66</sup> Jimly Assiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.63-64.

daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

**b. Fungsi dan Muatan Peraturan Daerah**

Keberadaan Peraturan Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan nampak dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal tersebut, menetapkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dilihat dari susunan di atas, maka Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan terendah dalam sistem peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan desa/peraturan setingkat. Ketentuan lain yang berkaitan dengan hirarki peraturan perundang-undangan adalah ketentuan Pasal 7 ayat (4) yang

menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Peraturan Daerah dibentuk dan memiliki kekuatan hukum tentu saja mempunyai fungsi, seperti yang diketahui sebuah peraturan tidak akan serta merta dibentuk. Fungsi Peraturan Daerah secara normatif menurut Pasal 136 ayat 2-3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai instrumen hukum penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan instrumen hukum untuk menjabarkan lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan daerah merupakan instrumen yuridis di daerah kota/kabupaten ataupun Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat otonom.

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah di Indonesia. Jika sebelumnya pada era orde baru semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun beberapa hal tetap harus diatur oleh pemerintah pusat.

---

<sup>67</sup>Maria Farida Dkk, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008) h.50.

Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan negara yang begitu kompleks. Menurut Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam hal ini pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah harus mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yakni salah satunya mengenai pembentukan peraturan daerah sebagai landasan hukum di daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.<sup>68</sup>

Fungsi tersebut berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, tergantung pada luasnya urusan yang akan diatur serta sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerahnya. Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan

---

<sup>68</sup> Muhammad Asrianto Zainal, Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, *Al Izzah* Vol 13, Nomor 2 November, 2018, h. 211.

pelaksanaan perdapun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pada hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah.

Peraturan daerah juga merupakan instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Dengan demikian peraturan daerah merupakan landasan bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melakukan pengendalian masyarakat dan kebijakan pemerintah, sebagai dasar hukum melakukan fungsi pengawasan dan untuk menegakan hukum.

Selanjutnya, peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, perda tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan.

Secara khusus Peraturan daerah berfungsi untuk memajukan, menggerakkan, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam kawasan wilayah tersebut seperti melalui pembangunan tempat tinggal, pertanian, perindustrian serta

perdagangan. Peraturan daerah juga berfungsi menyeleraskan aktivitas di dalam kawasan wilayah daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan otonomi daerah telah membuat seluruh pemerintah daerah bergiat membenahi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah mencoba membenahi berbagai sektor, membangun berbagai dasar hukum sebagai pengatur aktivitas di daerah, termasuk didalamnya perda. Beberapa daerah jumlah perda yang diundangkan dijadikan salah satu indikator kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Banyak daerah memberlakukan peraturan daerah dengan baik, artinya peraturan daerah tersebut dapat membantu kelancaran pelayanan umum atau melayani hak masyarakatnya, serta sejalan dengan peraturan hukum di tingkat yang lebih tinggi. Pemda dapat memaksimalkan peraturan daerah dalam pembangunan daerahnya demi melayani kesejahteraan masyarakat.

Mengenai muatan yang terdapat di dalam peraturan daerah dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 diatur tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang mengandung asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Namun dapat pula berisi asas lain seperti dalam hukum

pidana maupun hukum perdata sesuai dengan bidang hukum perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 12 diatur mengenai materi muatan perda. Materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Dalam penyusunan raperda akan melihat faktor objek atau masalah yang akan diatur, daerah hukumnya, objek permasalahan serta asas dalam pembentukan perda sebagaimana tercantum dalam Pasal 137 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rancangan perda dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepala Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Raperda disiapkan oleh kepala daerah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedangkan raperda yang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah.

Pembahasan raperda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khusus menangani legislasi dan dalam rapat paripurna. Kemudian raperda yang telah disetujui bersama oleh Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Peraturan daerah. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak raperda tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota maka raperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan.

Salah satu acuan dari materi muatan peraturan daerah adalah ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut dirumuskan bahwa urusan pemerintahan daerah terdisi dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 adalah yang terkait dengan pelayanan dasar yang meliputi:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Lingkungan Hidup;
- d) Pekerjaan Umum;
- e) Penataan Ruang;
- f) Perencanaan Pembangunan;
- g) Perumahan;
- h) Kepemudaan dan Olahraga;

- i) Penanaman Modal;
- j) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- k) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l) Ketenagakerjaan;
- m) Ketahanan Pangan;
- n) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p) Perhubungan;
- q) Komunikasi dan Informatika;
- r) Pertanian;
- s) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- u) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v) Sosial;
- w) Kebudayaan;
- x) Statistik;
- y) Kearsipan;
- z) Perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan meliputi:

- a) Kelautan Dan Perikanan;
- b) Pertanian;
- c) Kehutanan;
- d) Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- e) Pariwisata;
- f) Industri;
- g) Perdagangan;
- h) Ketransmigrasian.

Dari aspek kesesuaian jenis peraturan perundang-undangan dan materi muatannya, maka urusan-urusan wajib dan pilihan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2008 merupakan dasar penentuan materi muatan suatu peraturan daerah.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h.55-58.

### c. Pembentukan Peraturan Daerah dan Kedudukannya

Pembentukan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract legal norms*) berupa peraturan yang bersifat tertulis (*statutory form*), pada umumnya didasarkan atas beberapa hal. Pertama, pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar. Kedua, pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan hukum.<sup>70</sup>

Adapun proses pembentukan daerah terutama berkenaan dengan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, dan Peraturan Daerah Kota mirip dengan dengan pembentukan Undang-Undang di tingkat pusat. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang selanjutnya berubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undngan menentukan bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam Pasal 28 ditentukan bahwa rancangan Peraturan Daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau aat kelengkapan perwakilan daerah yang khusus menangani bidang legislasi.

---

<sup>70</sup> Jimly Assiddiqie, *Perihal Undang-Undang...*h.179

Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur atau bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah itu dilaksanakan oleh sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah.

Sementara itu, penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Apabila dalam satu masa sidan, gubernur atau bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota. Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dimaksud dilakukan dalam rapat komisis/panitia/aat kelengkapan dewan

perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota.

Mengenai penetapan peraturan daerah tersebut, ditentukan pula pada Pasal 42 bahwa rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan peraturan daerah dimaksud oleh pasal 42, menurut ketentuan pasal 43, ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota. Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat tiga puluh

hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kalimat pengesahannya berbunyi: peraturan daerah ini dinyatakan sah. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah kedalam lembaran daerah.

Peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi provinsi, kabupaten, maupun peraturan daerah kota diundangkan dalam lembaran daerah, sedangkan peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota atau peraturan lain di bawahnya dimuat di dalam berita daerah. Pengundangan peraturan daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan berita daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Selanjutnya, setelah diundangkan sebagaimana mestinya, peraturan daerah tersebut wajib disebarluaskan. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam berita daerah. Untuk itu kepala pemerintah daerah, yaitu gubernur, bupati, dan walikota harus melaksanakan kewajibannya itu dengan sungguh-sungguh dengan menyelenggarakan berbagai program penyebarluasan informasi dan pengetahuan hukum dalam lingkup wilayah tanggung jawabnya masing-masing.

Bahkan penyebarluasan informasi dan pengetahuan hukum itu sendiri harus pula dimaknai sebagai tanggung jawab yang menyangkut tuntutan kebutuhan akan pendidikan, kemasyarakatan, dan pembudayaan hukum dalam arti yang lebih luas dan menyeluruh di setiap daerah, sehingga upaya mewujudkan cita negara hukum, dimana sistem hukum dan konstitusi yang menjadi landasan bekerjanya sistem bernegara dalam bejalaman dengan sebaik-baiknya dimana hukum dan keadilan benar-benar terwujud sebagaimana mestinya.<sup>71</sup>

Berbicara tentang pembentukan peraturan daerah maka kita kan berbicara tentang kedudukan peraturan daerah. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum Perubahan), dan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tidak menetapkan Peraturan Daerah didalamnya, namun sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 eksistensi Peraturan Daerah telah diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat umum, bahkan Peraturan daerah selalu diakui keberadaannya di dalam Sistem Hukum di Indonesia. Pengakuan tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli sebagai berikut :

- a. Irawan Soejito menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h.191-193.



mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah.

- b. Amiroeddin Syarif menyatakan bahwa Peraturan daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Bagir Manan menyatakan bahwa Peraturan daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.
- d. A. Hamid S Attamimi menyatakan bahwa dalam tata susunan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak dibawah peraturan perundangundangan di tingkat Pusat (dalam hal ini kedudukannya di bawah Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen).

Dari keempat pendapat tersebut terlihat bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan

yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah, dan penyelenggaraan otonomi daerah tentunya tidak akan berdiri sendiri tanpa adanya Pemerintahan di Tingkat Pusat.<sup>72</sup>

Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keaneka-ragaman antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini dianggap sangat penting, karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan internasional di berbagai bidang ekonomi, politik dan kebudayaan terus meningkat dan meng-haruskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab kepada daerah secara proporsional. Pelaksanaan otonomi daerah itu diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya masing-masing serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman antar daerah.

Pada dasarnya, desentralisasi bertujuan membangun partisipasi masyarakat dan mengundang keterlibatan publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan yang dijalankan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Maria Farida Dkk, *Laporan Kompendium Bidang Hukum...* h.52-53.

<sup>73</sup> Fauzi Iswahyudi, Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *De Lega Lata*, Vol I, Nomor 1, Januari – Juni 2016, h.100.

Peraturan daerah dalam hirarkhi hukum positif Indonesia merupakan bentuk peraturan yang paling rendah tingkatannya. Peraturan daerah merupakan produk hukum badan legislatif daerah bersama Pemerintah daerah dan merupakan implementasi politik legislasi dan asas legalitas dalam negara hukum sesuai konsep sistem hukum Eropa kontinental dan *Anglo saxon-the rule of law*.<sup>74</sup>

Sistem hukum Eropa kontinental atau dikenal dengan *Civil Law* system didasarkan atas hukum Romawi mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *civil law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi.

Sistem hukum eropa kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya.

Sistem hukum *anglo saxon* atau dikenal dengan *common law* system ialah suatu sitem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum *Anglo Saxon*

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 51-52.

cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat, Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas.<sup>75</sup>

#### **d. Pencabutan Peraturan Daerah**

Mekanisme pencabutan/pembatalan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah yang bermasalah diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembetukan peraturan perundang-undangan di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 dinyatakan bahwa dalam suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, yang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jenis dan hirarki peraturan undang-undang di bawah undang-undang yaitu:

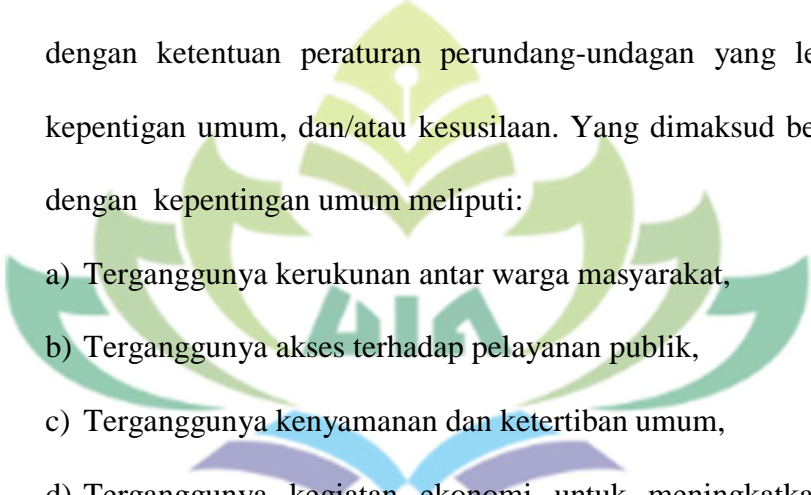
- 1) Peraturan Pemerintah,
- 2) Peraturan Presiden,
- 3) Peraturan Daerah Provinsi,
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Produk hukum daerah selain peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota mencakup juga peraturan yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan

---

<sup>75</sup> Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, *Jurnal Tapis*, Vol.11, No.1 Januari-Juni 2015, h.43-44.

perwakilan rakyat daerah kabupaen/kota, bupati/walikota, dan kepala desa atau yang setingkat. Selain diatur dalam undang-undang yang berkaitan diatas, mekanisme pencabutan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah yang bermasalah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilarannng bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- 
- a) Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat,
  - b) Terganggunya akses terhadap pelayanan publik,
  - c) Terganggunya kenyamanan dan ketertiban umum,
  - d) Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau
  - e) Diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, ras, golongan, dan gender.

Peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh menteri. Peraturan daerah kabupaten/kota dan perturan

bupati/walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/kesusilaan, menteri membatalkan peraturan daerah kabupaten/atau kota dan/atau peraturan bupati/walikota. Pembatalan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur ditetapkan dengan keputusan menteri dan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Paling lama 7 hari setelah putusan pembatalan, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan peraturan daerah tersebut yang selanjutnya dewan perwakilan rakyat daerah bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah yang dimaksud. Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan peraturan kepala daerah dan selanjutnya kepala daerah mencabut peraturan kepala daerah daerah tersebut.

Mekanisme pencabutan/pembatalan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah yang bermasalah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Direktur jenderal

otonomi daerah atas nama menteri dalam negeri membentuk tim pembatalan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur yang anggotanya terdiri atas komponen lingkup kementerian dalam negeri dan kementerian terkait sesuai kebutuhan. Tim pembatalan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur ditetapkan dengan keputusan menteri dalam negeri. Tim tersebut di atas mempunyai tugas melakukan kajian terhadap peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur yang dituangkan dalam berita acara.<sup>76</sup> Kajian dilakukan paling lama 30 hari sejak diterima oleh tim. Dalam kajian itu di periksa bertentangan atau tidaknya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan yang dapat menjadi alasan pembatalan Peraturan daerah yang bersangkutan.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Masalah pencabutan peraturan daerah masih sedikit dibicarakan. Hanya ada sedikit penelitian yang membahas tentang pencabutan peraturan daerah ini, sehingga menjadi bahan yang menarik untuk diteliti. penelitian yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pencabutan sebuah peraturan daerah belum ada yang membahasnya. Adapun penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pembatalan/pencabutan peraturan daerah sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, *Mekanisme Pencabutan atau Pembatalan Peraturan Daerah, Kepala Daerah , dan Keputusan Kepala Daerah yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, h. 5-7.



Hasil skripsi dari Farhan Bestyardi yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah”, dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membuat keputusan terhadap pembatalan peraturan daerah di Indonesia dan melihat bagaimana penerapan pasal 145 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa pembatalan peraturan daerah ditetapkan dengan peraturan presiden. Kesimpulan dari penelitian ini sendiri adalah penagwasan represif yang dimiliki oleh Mendagri terdapat pada pasal 185 ayat 5, pasal 188, dan pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pembatalan Perda yang dilakukan oleh Mendagri ini sesuai dengan pasal 145 ayat 7 yang menyebutkan pembatalan Perda itu dilakukan oleh Presiden. Selain itu keputusan/peraturan menteri yang bersifat teknis dan sektoral tidak bisa membatalkan yang substansi atau materi muatannya penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah demi menjalankan otonomi seluas-luasnya.<sup>77</sup>

Kemudian hasil penelitian dari minolah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Di Indonesia” adapun tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana Kewenangan pengujian peraturan daerah Provinsi di Indonesia dan Instrumen hukum pembatalan perda Provinsi yang ditetapkan melalui dan jangka waktu pembentukan perda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kewenangan

---

<sup>77</sup> Farhan Bestyardi, Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

pengujian peraturan daerah Provinsi di Indonesia saat ini dilakukan lewat dua model kewenangan, yaitu *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan *executive review* oleh Pemerintah yaitu Kementrian Dalam Negeri kemudian Ketentuan Pasal 185 UU No. 32/2004 khususnya mengenai: ketentuan waktu 3 (tiga) hari untuk menyampaikan Raperda Provinsi dan Perda Provinsi oleh Pemerintah Daerah; Ketentuan waktu 15 (lima belas) hari untuk mengevaluasi, oleh Mendagri; Ketentuan waktu 7 (tujuh) hari untuk menyempurnakan Perda oleh Kepala Daerah dan DPRD tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini. berimplikasi terhadap ketentuan batas waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menetapkan perda seperti yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 144 ayat (3) UU No. 32 /2004 menjadi terabaikan.<sup>78</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun yang menjadi pembeda adalah penulis memfokuskan pada faktor-faktor pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 yang mana Perda ini dicabut melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 yang sebelumnya telah dibatalkan terlebih dahulu melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5215 Tahun 2016 dan bagaimana pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 dengan analisis hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>78</sup> Minolah, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Di Indonesia, *Syar Hukum*, Vol. XIII. No. 1 Maret 2011.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yogyakarta: CV Diponegoro. Cet.5.

### B. Buku

Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Terj. Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000).

Ali Muhammad Rusjdi, *Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Assiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Basyir Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Konsep Dan Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

Djazuli A, Fiqh Siyasah, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Fajar Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Farida Maria Dkk, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008).

Halim Abdul, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005).

- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Indrati S Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Kautum Ranny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000).
- Khaliq Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Terj. Faturrahman ( Jakarta: Amzah, 2005).
- Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Sanu Qutub Musthafa, *Mu'jam Musthalahat Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-Mu'ashir 2000.
- Sholihin Bunyana, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018).
- Sholihin Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018).

### C. Media Online

Mekanisme Pencabutan atau Pembatalan Peraturan Daerah, Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, artikel diakses pada 26 September 2019. Sumber: <http://koran.bisnis.com/read/20160404/251/534142/daya-saing-perda-bermasalah>

### D. Sumber dari Jurnal dan Skripsi

Bestyardi Farhan, Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

- Fatarib Husnul, Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam), *NIZAM*, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014.
- Husni Muhammad dan Fathul Wahab, Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam, *Jurnal Annaba*, Volume 4 No. 2, 1 September 2018.
- Iryani Eva, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Iswahyudi Fauzi, Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *De Lega Lata*, Vol I, Nomor 1, Januari – Juni 2016.
- Minolah, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Di Indonesia, *Syar Hukum*, Vol. XIII. No. 1 Maret 2011.
- Nurhardianto Fajar, Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, *Jurnal Tapis*, Vol.11, No.1 Januari-Juni 2015.
- Rusfi Muhammad, Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, *AL- 'ADALAH* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.
- Sulistiyo Iwan dkk, Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
- Zainal Muhammad Asrianto, Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, *Al Izzah* Vol 13, Nomor 2 November, 2018.

#### **E. Perundang-Undangan**

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

